

## **BAB 5**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka. Dikarena Dalam proses penyusunan laporan keuangan dibantu menggunakan aplikasi yang disebut SIMDA dimana sumber daya manusia yang bertugas membuat laporan keuangan tidak harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang siklus akuntansi karena sumber daya manusia hanya menginput data saja.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengujian hipotesis berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Karena sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dalam sebuah aplikasi yaitu SIMDA yang diyakini dapat menjadi salah satu tolak ukur kualitas laporan keuangan daerah dikarenakan dapat menjelaskan dan mewakili penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten sikka, dimana apabila SIMDA yang disajikan menghasilkan hasil yang akurat dan bagus maka hasil yang disajikan pada kualitas laporan keuangan juga akan demikian. Laporan keuangan Kabupaten Sikka mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berarti sistem akuntansi yang diterapkan pada aplikasi SIMDA berpengaruh namun belum akurat dengan kata lain masih perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku.
3. Sistem pengendalian internal dalam pengujian hipotesis berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka. Namun terdapat beberapa jawaban

dari responden bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka belum menerapkan sistem informasi secara serentak sehingga responden memilih jawaban antara ada dan tidak. Jawaban yang diberikan dari responden juga mengatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka belum menerapkan pemisahan tugas dengan baik sehingga mereka memilih jawaban netral atau tidak setuju. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian yang berlaku di Kabupaten Sikka belum baik, dan laporan keuangan Kabupaten Sikka memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Dapat disimpulkan apabila sistem pengendalian internal baik maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan juga baik.

## **5.2 Keterbatasan**

1. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan berasal dari peneliti sebelumnya sehingga ada kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengukurannya, karena pernyataan yang terdapat dalam kuesioner belum tentu menggambarkan keadaan yang sama dengan objek penelitian yang sekarang.
2. Sistem dan alur perijinan penelitian yang cukup rumit mengakibatkan peneliti terlalu banyak menghabiskan waktu dalam proses perijinan, yang pada akhirnya berdampak pada sedikitnya waktu untuk mendampingi responden dalam mengisi kuesioner penelitian.
3. Hanya diijinkan tiga kuesioner yang dapat disebarakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka.
4. Tidak bisa menentukan siapa responden yang akan mengisi kuesioner.
5. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik sumber daya manusia, penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan daerah. Variabel ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah secara umum karena masih banyak variabel lain yang bisa digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan daerah seperti pemanfaatan teknologi informasi, reviu laporan keuangan, dan etika profesi.

### 5.3 Saran

#### 1. Saran Akademis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama. Peneliti berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lanjutan. Peneliti juga mengharapkan agar peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode yang lebih bervariasi, misalnya dengan wawancara atau penyebaran kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

#### 2. Saran Praktis

Pemerintah daerah harus harus lebih meningkatkan lagi terkait kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sikka demi menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D., dan Yusrawanti. (2015). Pengaruh sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 24(1), 65-72.
- Anissa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Siaran Pers Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 Kabupaten Manggarai Timur. Didapatkan dari <http://kupang.bpk.go.id/>.
- Desinan, W.K., Herawati, N.T., dan Sinarwati, N.K. (2014). Pengaruh kompetensi sdm, penerapan sap, dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi program SI*, 1(2).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardyansyah. (2016). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi pada skpd kabupaten polewali mandar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 42-47.
- Hasanah, N., dan Achmad F. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Hutapea, Parulian, dan Toha. (2008). *Kompetensi Komunikasi Plus:Teori, desain, Kasus dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi Yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Artikel Universitas Negeri Padang*.
- Imraah, M., Effendi, R., dan Dhia, C. (2015). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada dispenda kota Palembang. *Jurnal STMIK GI MDP*.
- Indriasih, D. (2014). The effect of government apparatus competence and the effectiveness of government internal control toward the quality of financial reporting in local goverment. *Research Journal of Finance and Accounting*. 5(20), 2222-2847.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kulumata, Ilat, dan Warongan. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Andi-Yogyakarta.

O'Brien dan Marakas. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

- Rahmadani, S. (2015). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (*Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia).
- Runtu, Mandey, dan Ogotan. (2015). Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Bagian Akademik Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sudarsana, Rahardjo. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia), *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2/2013.
- Suryaningsih, Sisdyani. (2013). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia), *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 15.2/Mei 2016.
- Toban, dan Kurniawan. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Zelmiyanti. (2015). Perkembangan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Sektor Pemerintah di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Volume 6/2015.
- Zuliarti. (2014). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah: studi pada pemerintah kabupaten kodus. (*Skripsi*, Universitas Mulia Kudus, Indonesia).